

PERANAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK SISWA KELAS X DI MA AL-MUTHMAINNAH

Irlan Haerul

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP Unsur
Universitas Suryakencana
irlanhaerul95@gmail.com

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang mengharuskan warganegaranya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa. Siswa sebagai warga negara Indonesia diharuskan berpartisipasi dalam bidang politik dengan jalan berpartisipasi dalam kegiatan politi. Untuk emningkatkan partisipasi politik diperlukan kesadaran politik dari diri siswa. Salah satu jalan untuk meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Pendidikan ini akan berhasil apabila lembaga-lembaga politik dapat menjalankan perannya dengan baik. Lembaga pendidikan politik yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa yaitu Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X di MA AL-MUTHMAINNAH? Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X di MA AL-MUTHMAINNAH. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik penelitian angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Objek penelitian adalah siswa MA AL-MUTHMAINNAH sebanyak 164 siswa yang diwakili sampel 35 orang dengan kisaran 20% dari populasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pendidikan politik terhadap siswa dilakukan oleh tiga lembaga pendidikan politik yaitu : Guru PPKn, Pembina OSIS, dan Pembina Pramuka, siswa memperoleh pembelajaran politik dari ketiga lembaga pendidikan politik tersebut sehingga partisipaasi politik siswa meningkat yang ditandai dengan siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan prilaku politik yang ditandai dengan kesadaran siswa berpartisipasi dalam pemilihan ketua Oraganisasi Siswa Intra Sekolah dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah, prilaku politik siswa meningkat yang ditandai dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan partisipasi politik siswa juga meningkat dilihat dari tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sangat aktif. Kesimpulan pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik. Untuk itu kepada semua pihak disarankan agar memiliki kepedulian terhadap pendidikan politik agar partisipasi politik dapat meningkat.

Kata Kunci : *Pendidikan politik, Komunikasi politik, Pembinaan politik, Penyuluhan politik.*

A. Pendahuluan

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki unsur-unsur wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi. Rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, kesejahteraan negara terkait dengan rakyatnya, antara lain terkait dengan pendidikan mereka. Pendidikan berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat.

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Hayer dalam Kartini Kartono (1989 : 64) mengemukakan pendidikan politik ialah usaha

membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik mendidik siswa agar mereka melek politik, artinya siswa diharapkan sadar politik selaku generasi penerus bangsa.

Pendidikan politik di sekolah diharapkan dapat mencerdaskan, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa terhadap kegiatan kenegaraan, baik itu dalam hal administrasi negara, sistem negara, dan hal-hal yang menyangkut kenegaraan. Sehingga pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dapat meningkat, menjadikan siswa insan politik yang jujur dan bertanggung jawab baik itu dilingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.

Kartini Kartono (1989:68) menyatakan bahwa pendidikan

politik adalah rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menjunjung pemberlakuan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

Pendidikan politik di Sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn, OSIS, dan PRAMUKA. Pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn disampaikan dalam materi pembelajaran seperti suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi warga negara dalam

sistem politik Republik Indonesia dan materi-materi lainnya.

Pendidikan politik di sekolah melalui OSIS seperti mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS), ikut dalam pemilihan ketua osis, dan pembentukan pengurus osis.

Pendidikan politik melalui PRAMUKA seperti ikut seminar dan atau diklat kepemimpinan Pramuka, kursus kepemimpinan Pramuka, mengikuti pembinaan oleh pembina pramuka, DKR, DKC, DKD, maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam Pramuka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrila (2015:178) berjudul Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Kesadaran Politik Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sukaresmi menyatakan bahwa pendidikan politik lebih

efektif jika dilakukan dalam keluarga, sekolah dan media informasi. Dalam hal ini Febrila mengemukakan :

Pendidikan politik terhadap siswa merupakan tugas dari lembaga-lembaga pendidikan politik. Lembaga pendidikan politik yang paling berpengaruh secara signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa adalah keluarga, sekolah dan media informasi.

Dari hasil wawancara dengan guru PPKn MA AL-MUTHMAINNAH mengenai pendidikan politik disekolah tersebut, terungkap bahwa dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terdapat beberapa materi politik seperti hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia,

Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Penyampaian nya menuntut guru PPKn untuk memberi pemahaman kepada siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran politik siswa, dan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di sekolah atau lebih luasnya dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat melaksanakan kegiatan PPL pendidikan politik di sekolah disampaikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) agar siswa mengerti makna politik, tujuan politik, kegunaan politik dan sadar politik di sekolah khususnya dan dalam kehidupan umumnya di masyarakat dan Negara. Pendidikan politik melalui program pengembangan diri, antara lain melalui OSIS, dan PRAMUKA di harapkan mampu membuat siswa sadarkan berpartisipasi dalam kepemimpinan OSIS, kepemimpinan Pramuka, kegiatan yang diselenggarakan OSIS, kegiatan yang diselenggarakan Pramuka.

Berdasarkan paparan di atas terkait pendidikan politik di sekolah baik melalui PPKN, OSIS, maupun

Pramuka membina siswa, agar mereka memiliki kesadaran politik, antara lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan OSIS dan Pramuka di sekolah secara proporsional. Tuntutan itu mengemuka supaya siswa siap berpartisipasi dalam keidupan politik bangsa dengan penuh tanggung jawab. Kenyataan di Sekolah, kesiapan siswa berperan secara proporsional dan tanggung jawab baik dalam kepemimpinan OSIS maupun Pramuka masih menjadi pertanyaan. Perlu studi yang melihat tentang kesiapan itu.

B. Pembahasan

Negara indonesia yang menganut pemerintahan demokrasi memerlukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Peran rakyat dalam pemerintahan demokrasi sangat dibutuhkan dalam kemajuan bangsa

dan negara. Diharapkan setiap warganegara mau melibatkan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan agar terciptanya kehidupan negara yang demokratis. Menurut Wuryan dan Syaifullah (2008:71) bahwa.

Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi warganegara merupakan syarat pokok atau utama yang mesti dilakukan oleh setiap warganegaranya dalam proses politik. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan sendirinya akan mengalami hambatan manakala warganegaranya tidak partisipatif dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan negaranya. Namun sebaliknya jika warganegara mampu melibatkan dirinya atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, maka akan mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik sedangkan negara yang demokratis memerlukan partisipasi warga negaranya, maka dari itu masyarakat harus diberi

pendidikan politik agar masyarakat bisa memahami perannya sebagai warganegara dalam kegiatan politik dan menjalankan kegiatan politik. Pendidikan politik mendorong masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kartono (2009:58) mengemukakan bahwa.

Tugas pendidikan politik ialah menyadarkan fungsi politik setiap individu untuk menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam proses politik.

Tujuannya ialah agar pemerintah yang menerapkan kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh warga negara ditengah banyak konflik dan perbedanaan kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh rakyat.

Jelaslah dalam proses pendidikan politik itu rakyat diajak ikut mempengaruhi *beleid* politik pemerintah dalam iklim demokratis. Sebab partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan politik organ-organ kenegaraan di semua sendi dan sektor itu dianggap perlu. Oleh karena itu pendidikan politik dapat disebut sebagai *staatsburgelijke vorming*

(pendidikan pembentuk kewarganegaraan).

Berdasarkan pendapat diatas pendidikan politik memiliki tugas untuk menyadarkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pendidikan politik menumbuhkan kesadaran politik pada setiap orang yang mempelajarinya kemudian setelah sadar mereka akan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara berpartisipasi dalam segala kegiatan politik pemaparan ini sejalan dengan pendapat dari Wuryan dan Syaifullah (2008:71) bahwa.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara mesti dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Dan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut pendidikan politik memiliki kedudukan yang sangat penting. Pendidikan politik (*political education*) sebagai salah satu konsep dalam ilmu politik, berkenaan dengan bagaimana usaha atau upaya yang

dilakukan agar warga negara atau masyarakat mengerti dan memahami politik.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan baik karena manfaat pendidikan politik sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008:72) bahwa. Pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali akan berkontribusi positif bagi bangsa.

Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan politik maka pendidikan politik harus dijalankan dengan baik agar manfaat dari

pendidikan tersebut dapat memberi perubahan pada bangsa ini. Pendapat lain mengenai pentingnya menjalankan pendidikan politik dengan baik dikemukakan oleh Kartono (2009:68) bahwa.

Jika pendidikan politik tersebut dilakukan dengan baik dan sistematis maka pasti akan ditumbuhkan kekuatan kontra yang demokratis dan positif konstruktif. Yaitu menjadi kekuatan yang kritis untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak sehat, buruk, tidak adil, tidak mantap, dan tidak wajar. Kemudian orang berusaha menciptakan iklim yang lebih demokratis dan lebih sehat, untuk membuat kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya menjadi lebih baik.

Pendidikan politik merupakan upaya untuk membentuk seseorang agar memiliki kesadaran politik dan kesadaran politik itu ada setelah memperoleh pengetahuan politik dari lembaga formal maupun non formal pendidikan politik tidak dapat dilakukan oleh satu

lembaga pendidikan saja, tapi seluruh lembaga pendidikan politik harus bersama-sama memberikan pendidikan politik pada warga negara agar warga negara tersebut memiliki kesadaran politik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ruslan (2000:89) bahwa.

Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak dalam lembaga tersebut. Pada setiap warga negara membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatnya, yang warga negara menjadi sadar dan maupun memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan berpartisipasi secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan mengantarkan kepada perubahan arah yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat diatas yang berperan dalam pendidikan politik adalah lembaga-lembaga

politik formal maupun non formal. Lembaga politik yang berperan dalam pendidikan politik siswa adalah keluarga, sekolah, dan media informasi. Apabila lembaga-lembaga ini menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan politik dengan baik maka tujuan pendidikan politik itu menumbuhkan kesadaran politik siswa akan tercapai. Kesadaran politik yang ditujukan oleh siswa yaitu kepribadian politik, perilaku politik, dan partisipasi politik.

C. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian penggunaan metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting hal ini agar dapat memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data, pengolahan data dan menginterpretasikan data dalam hasil penelitian. Metode penelitian

diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhitungkan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono,2016:2).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu (Fathoni,2006:97). Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian ini karena penulis membutuhkan dataa serta informasi yang sistematis dan akurat dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penulis agar nantinya dapat menguji hipotesis dan berusaha untuk bisa

mendapatkan gambaran mengenai yaang ingin diteliti.

Pada penelitian ini selain menggunakan metode penelitian deskriptif penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:19) bahwa bagi penelitian kualitatif, pembinaan realitas ini dilakukan melalui logika-justifikasi atau dengan menyediakan beberapa contoh rangkaian bukti yang boleh mendukung sesuatu asumsi yaang dibuat atau interpretasi yang dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan teknik penelitian dengan mengumpulkan data yang dapat digunakan oleh peneliti untuk dapat memberikan rangkaian informasi dan bukti, untuk dapat meyakinkan serta membuktikan hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh.

D. Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian langsung kelapangan yakni di MA AL-MUTHMAINNAH yang berlangsung di Jl. Agrabinta, Sindangbarang, Ds. Kertasari kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Penulis mempunyai gambaran tentang judul yang diteliti yaitu mengenai Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa di MA AL-Muthmainnah.

Penelitian yang dilakukan melalui tiga metode penelitian yaitu : angket, wawancara, dan observasi. Penyebaran angket penulis lakukan kepada siswa siswi MA AL-MUTHMAINNAH kelas X dengan cara acak, kemudian wawancara dilakukan kepada Guru mata pelajaran PPKn dan juga kepada Pembina OSIS dan Pramuka.

Selanjutnya observasi langsung dilaksanakan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa.

Berdasarkan data hasil angket yang diperoleh dari siswa siswi MA AL-MUTHMAINNAH. Data hasil wawancara serta observasi, ternyata diketahui bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa di MA AL-MUTHMAINNAH. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari (wuryan dan Syaifullah 2007:71). Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara mesti dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Dan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut, pendidikan politik memiliki kedudukan sangat penting.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan politik diantaranya dilakukan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ruslan (2000:89), yaitu:

Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak dalam lembaga tersebut. Pada setiap warga negara membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan berpartisipasi secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan mengantarkan kepada perubahan menuju arah yang lebih baik.

Hasil penelitian ini dapat terbukti dengan data dari salaahsatu

angket yang digambarkan dalam tabel XVII menyatakan semua jawaban diatas benar (sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan politik, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman politik, sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi politik).

Selain itu hasil wawancara menunjukan bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik siswa khususnya memberikan pengetahuan politik dan pemahaman politik pada siswa karena dengan pengetahuan dan pemahaman siswa dapat mengaplikasikannya dalam bentuk kesadaran politik diantaranya kepribadian politik, perilaku politik dan partisipasi politik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh dalam

meningkatkan partisipasi politik siswa di MA AL-MUTHMAINNAH.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidikan politik yang diberikan merupakan tugas dari lembaga-lembaga pendidikan politik yang paling berpengaruh secara signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
2. Berdasarkan kajian teori bahwa komunikasi politik, pembinaan politik dan penyuluhan politik memiliki hubungan yang kuat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik siswa.

Berdasarkan penelitian

partisipasi politik siswa dapat dilihat dari tiga hal yaitu : Siswa memiliki pengetahuan politik, pemahaman politik, dan penerapan politik siswa.

3. pendidikan politik dalam keluarga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa, dapat dilihat melalui tiga hal yaitu terbentuknya kepribadian politik siswa melalui pengalaman berinteraksi dengan kekuasaan orang tua meningkatnya pengetahuan politik siswa melalui diskusi dalam keluarga dan meningkatnya pemahaman politik siswa melalui pemberian kesempatan berpendapat dalam keluarga.
4. Sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan politik dalam

meningkatkan partisipasi politik siswa yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan politik siswa, pemahaman politik siswa.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di MA AL-MUTHMAINNAH, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sekolah perlu meningkatkan intensitas pengajaran politik terhadap siswa diadakannya kegiatan - kegiatan yang dapat melatih kemampuan siswa dalam berpolitik, memberi pengarahan kepada semua guru agar membiasakan siswa mengeluarkan pendapatnya dan membiasakan kehidupan berdemokrasi di sekolah dengan mengajarkan nilai - nilai kebebasan, kemanusiaan,

kesamaan, persaudaraan,
kejujuran, dan keadilan.

2. Bagi Guru PPKn

Guru PPKn diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap ranah politik agar siswa bisa lebih mengerti, disarankan pula agar guru PPKn bukan hanya memberi pengajaran melalui materi-materi tetapi melalui praktek langsung dan lebih memberi kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya.

3. Bagi keluarga siswa Terutama

Orang Tua

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertamaa dan utama diharapkan mampu memberikan

contoh-contoh tindakan yang tepat dalam berpolitik, jangan membiarkan siswa apatis terhadap politik, menciptakan suasana dirumah yang nyaman untuk siswa agar siswa tidak takut untuk mengeluarkan pendapatnya dan menciptakan suasana yang lebih demokratis di rumah.

4. Bagi Siswa

Bagi siswa diharapkan mampu meningkatkan keingintahuan pada politik, bisa memfilter informasi yang baik dan yang buruk dari lembaga-lembaga politik dan menjadi insan politik yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Iskandar, (2008) *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosiologi (Kualitaatif dan Kuantitaatif)*. Jakarta: Gaung Persada.

Kartono, Kartini. 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju

Ruslan, Utsman Abdul Muiz, 2000 *Pendidikan Politik Ikhwal Muslimin*, Solo: Intermedia.

Sugiono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Wuryan, Sri dan Syaifullaah. *Ilmu Kewrganegaraaan (Civics)*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewargaanegaraan UPI.

Riwayat Penulis

Penulis lahir di Cianjur pada tanggal 08-08-1997 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Mukayat dan Ibu Ikah Maelani memasuki Sekolah Dasar tepatnya di SDN Jatinagara lulus pada tahun 2008, tahun 2008 melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTS AL-MUTHMAINNAH dan lulus tahun 2011.

Pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sindaangbarang dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mengikuti jenjang S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. FKIP Universitas Suryakaencana Cianjur.

Penulis sekarang bertempat tinggal di Kp. Sukarame RT/RW 01/01 Desa Kertasari, Kec Sindangbarang, Kab. Cianjur. Jawa Barat.